

# EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM ANAK CERIA JIPAT DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK MENUJU GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE

Irfan Naufal<sup>1</sup>, Denok Kurniasih<sup>2</sup>, Tobirin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman  
e-mail: irfan.naufal@mhs.ac.id<sup>1</sup>, denok.kurniasih@unsoed.ac.id<sup>2</sup>, tobirin@unsoed.ac.id<sup>3</sup>

## Abstrak

Tujuan penelitian untuk Menilai Pengaruh Program Anak Ceria JIPAT terhadap penguatan tata kelola kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan produktif di tingkat administrasi public dalam hal Pelayanan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Metode penelitian kualitatif dengan melalui beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dikaitkan dengan kajian Teori Sutrisno (2007: 125- 126) yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata setra Mengacu pada pendapat Sabatier (1986: 21-48) dalam (Akib, 2010), mengenai dua model yang berpacu dalam tahap formulasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up, penulis menganggap bahwa refleksi kedua model tersebut dapat ditunjukkan pada tahap implementasi kebijakan dalam wujud yang sentralistik dan desentralistik, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas implementasi program Anak Ceria JIPAT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif. Namun masih belum menunjukkan *Good Public Policy Governance* hal ini ditunjukkan masih ada beberapa indikator dalam Implementasi belum maksimal. Dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelaksanaan Program Anak Ceria JIPAT.

**Kata kunci:** Implementasi Program, Anak Ceria, JIPAT, Good Public Policy Governance.

## Abstract

The research aims to assess the impact of the "Anak Ceria JIPAT" program on strengthening the governance of public policy and effective, efficient, and productive decision-making at the level of public administration in terms of program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible changes. The research method used is qualitative, employing various techniques, including observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research is related to Sutrisno's theory (2007: 125-126), which states that the measures of effectiveness include program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible changes. Referring to Sabatier's (1986: 21-48) two competing models during the policy formulation phase, namely the top-down and bottom-up models, the author believes that the reflection of these models can be seen in the policy implementation phase in both centralized and decentralized forms. The research results indicate that the effectiveness of implementing the "Anak Ceria JIPAT" program at the Department of Population and Civil Registration has generally been running well and effectively. However, it has not yet demonstrated Good Public Policy Governance, as there are still several indicators in the implementation that are not yet optimal. This can be seen from the understanding of the program, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible changes in the implementation process of the "Anak Ceria JIPAT" program.

**Keywords:** Program Implementation, Cheerful Children, JIPAT, Good Public Policy Governance.

## PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan adalah proses pemberian layanan, yang mengacu pada tindakan yang diambil secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi jika layanan tersebut telah menghasilkan sistem yang lebih canggih dengan perangkat keras pendukung yang mumpuni. Kotler (2016) mendefinisikan layanan sebagai suatu tindakan atau aktivitas yang mungkin diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada hakikatnya suatu jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud yang tidak

menghasilkan perolehan suatu harta benda. Menurut Loina dalam Brata (2001:138), pelayanan adalah suatu proses menyeluruh untuk mengembangkan citra perusahaan, baik melalui media berita, secara internal, atau dengan berbagi sudut pandang perusahaan dengan pihak lain yang berkepentingan dan pengambil keputusan. Pelayanan didefinisikan oleh Kasmir dalam Rahman (2017) sebagai kegiatan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memuaskan kliennya. Sedangkan menurut Mulyono dalam (Rahman,2017) "Pelayanan adalah rasa (Menyenangkan atau tidak menyenangkan) yang oleh penerima pelayanan pada saat memperoleh pelayanan".

Menurut Tjiptono dalam (Royana,2013) "Pelayanan (Service) bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari atas dua komponen utama yakni service operation yang kerap kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan(back office atau backstage) dan service delivery yang biasa tampak (visible) atau diketahui pelanggan(Sering disebut pula front office atau frontstage)" (Armaniah et al., 2019). Dengan demikian, terdapat sebuah konsekuensi logis bagi organisasi publik sebagai entitas pelayanan publik yaitu diterapkannya prinsip pelayanan dengan berbasis indikator efektif, efisien dan produktif serta tidak lagi menerapkan prinsip-prinsip yang "asal terlayani" kepada publik. Tuntutan inovasi dalam organisasi publik dan pemerintah pusat serta daerah memerlukan perhatian yang lebih serius dan harus dilakukan secara terintegratif dan simultan. Hal ini disebabkan karena inovasi yang dilakukan secara terintegratif dan simultan memiliki daya sebar yang berpengaruh terhadap seluruh bagian dalam organisasi.

Inovasi yang dilakukan secara parsial hanya akan berpengaruh terhadap bagian tertentu dalam organisasi dan kurang memberikan efek dan impact factor terhadap visi dan misi organisasi, pelayanan publik masih saja menjadi permasalahan yang sering menjadi pusat perhatian serta sangat sulit dalam mencari solusinya, padahal pelayanan merupakan hak konstitusi setiap warga Negara yang telah di pertegas dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan UU tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan harus mampu dalam memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya, karena pelayanan merupakan hal yang sangat penting yang menyangkut kepentingankepentingan berbagai pihak. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban tidak hanya mengatur dan menetapkan prosedur-prosedur saja, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan produktif sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan.

Pengertian implementasi di dalam studi kebijakan publik, dikatakan bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa dan apa yang didapat dari suatu kebijakan, implementasi merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan, dimana menurut Nugroho (2009, h 494) implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat meancapai tujuannya. Terdapat dua pilihan dalam mengimplementasikannya, yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program, sedangkan yang kedua adalah melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Bahri, 2020). Pada dasarnya kebijakan sendiri pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil, atau gagal.

Penilaian suatu kegagalan kebijakan berdasarkan pada penjelasan Hogwood dan Gunn (1986) dalam Abdul Wahab (2012, h. 128) yang 20 menyatakan terdapat pembagian pengertian kegagalan kebijakan ke dalam dua katogori besar, yakni tidak terimplementasikan, dan implementasi yang tidak berhasil, pemahaman tidak terimplementasikan, berarti suatu kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimungkinkan karena pihak-pihak terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau berkerja sama, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, kemungkinan permasalahan yang dihadapi diluar jangkauan kekuasaan pihak implementasi/pelaksana. Sehingga seberapapun gigihnya dalam mengimplementasikan hambatan-hambatan yang tidak sanggup untuk ditanggulangi. Sementara implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, yang kemudian kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil dikehendaki.

Salah satu pandangan dari seorang pakar ahli terbaik dengan proses implementasi adalah Van Mater dan van Horn (1978) dalam Abdul Wahab (2012, h. 135) yang merumuskan proses implementasi sebagai berikut: "Tindakan-tindakan Yang dilakukan baik oleh individual/penjabatpenjabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Pandangan Van Mater dan Van Horn (1978) tersebut berorientasi pada tindakan para pejabat dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan

dalam pembuatan keputusan kebijakan, pendapat tersebut dalam Abdul Wahab 21 (2012, h. 135) ditanyakan sebagai upaya pengimplementasian sebuah kebijakan yang memerlukan adanya tindakan-tindakan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan dalam mengimplementasikannya.

Melatarbelakangi tuntutan layanan adminduk yang tertib, cepat dan tepat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga membuat inovasi yaitu Program Anak Ceria JIPAT. Program ini merupakan program yang bertujuan memudahkan pengurusan dokumen KK, Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak, serta BPJS Kesehatan yang diperlukan untuk pasien yang melahirkan di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan Dinpendukcapil Purbalingga. Bagi pemohon yang mengikuti program Anak Ceria Jipat cukup melampirkan persyaratan Nama Bayi, Buku Nikah Asli, KTP Kedua Orang Tua Asli, dan Kartu Keluarga Asli yang diserahkan di Rumah Sakit/Puskesmas tempat pemohon melahirkan. Acara Launching program Anak Ceria JIPAT yang dilaksanakan di Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti selaku Sekda Purbalingga mengatakan “ada beberapa keluarga yang lupa atau terlambat untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS kesehatan bayi yang baru lahir dan hanya mengurus tiga surat bagian administrasi kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran.

Padahal, ada satu berkas yang tidak kalah penting yaitu BPJS sehingga diperlukan integrasi dan Kolaborasi yang memudahkan ketika melahirkan, Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. (CIFOR/PILI, 2005). Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu.

Sekian banyak pengertian yang dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun berdasarkan prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikian kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya yang menjadi esensi dari kegiatan ini. Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha menggabungkan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terklibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan padangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.

Rumah Sakit yang sudah bekerjasama di antaranya RSUD Goeteng Taroenadibrata, RS Panti Nugroho, RS At-tin Husada RS Siaga Medika, RS Ummu Hani, RSU Nirmala dan RS PKU Muhammadiyah Purbalingga. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan MoU antara Pemkab Purbalingga, RS baik negeri maupun swasta di lingkungan Kabupaten Purbalingga dan BPJS kantor perwakilan Purwokerto.

Suatu program yang dijalankan dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk menilai efektivitas suatu program perlu dilakukan agar dapat mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektifnya suatu program merupakan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yang telah dilaksanakan, sehingga melalui pengukuran efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai program tersebut. Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, yaitu sebagai berikut: 1) Ketepatan Waktu, merupakan dasar dalam menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi tetapi juga dapat memberikan dampak berupa kegagalan terhadap suatu aktivitas organisasi.

Apabila mampu menggunakan waktu secara tepat maka akan mampu menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; 2) Ketepatan perhitungan biaya, berhubungan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, yang berarti tidak terjadi kekurangan juga kelebihan dalam pembiayaan sampai tiba saatnya kegiatan terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam hal biaya merupakan komponen dasar dari efektivitas; 3) Ketepatan dalam pengukuran, merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang merupakan tanggung jawab dalam suatu organisasi; 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan, dalam menentukan pilihan tidaklah merupakan suatu persoalan yang mudah dan bukan hanya suatu aktivitas organisasi, begitu juga

sebaliknya jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Untuk mengukur efektivitas program menurut sutrisno (2007: 125- 126) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :1) Pemahaman program, dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program;2) Tepat Sasaran, dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan;3) Tepat Waktu, dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan; 4) Tercapainya Tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan;5) Perubahan Nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

## **METODE**

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2023 selama satu minggu. Kantor Kepala Desa Losari, RSUD Panti Nugroho Purbalingga, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga semuanya berpartisipasi dalam penelitian ini. Program Anak Ceria JIPAT Perspektif Administrasi Publik Menuju Good Public Policy Governance dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan peneliti, khususnya pemantauan efektivitas program dan lokasi. Peneliti lebih mudah mengumpulkan data objektif saat melakukan penelitian ini karena metode ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan menggunakan data dari peristiwa yang diteliti atau dianalisis. Penelitian deskriptif digunakan, menawarkan ringkasan berdasarkan fenomena.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan yaitu pertama peneliti melakukan pengamatan seperti apa kondisi lapangan dan pelaksanaan program anak ceria JIPAT, serta bagaimana pelaksanaan pelayanannya menurut para informan yang terkait di lokasi penelitian. Adapun Wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung melalui daftar pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya. Adapun Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, dokumentasi yang akan diambil yaitu berbentuk foto. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengabsahan data dengan menggunakan hasil triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Studi Kasus - Efektivitas Implementasi Program Anak Ceria JIPAT**

Ruang Lingkup Program Anak Ceria Jipat meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan pembuatan atau pendaftaran kepesertaan JKN-KIS pada bayi baru lahir bagi Pasien Penduduk Kabupaten Purbalingga. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018.

Untuk bayi baru lahir di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Dipendukcapil bisa langsung mendaftarkan permohonan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan pembuatan atau pendaftaran kepesertaan JKN-KIS, dengan melampirkan

beberapa persyaratan seperti : KTP Kedua Orang Kandung (Penduduk Kabupaten Purbalingga), Buku Nikah Asli, Kartu Keluarga Asli, Surat Keterangan Melahirkan (dari Buku KIA) yang berisi data bayi baru lahir dan ditandatangani oleh Petugas Kesehatan yang membantu proses melahirkan. Proses / Alur Pelayanannya adalah sebagai berikut:

1. Petugas Program Anak Ceria Jipat akan menerima, memverifikasi, dan validasi data permohonan.
2. Petugas memasukkan data diri Kedua Orang tua dan Bayi Baru Lahir ke Aplikasi Anak Ceria Jipat.
3. Petugas scan dokumen diatas dan di upload ke Aplikasi Anak Ceria Jipat.
4. Petugas mencetak Formulir Pelaporan Kelahiran (Formulir F.2-01) dari Aplikasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Pelapor dan mengetahui Kepala Desa.
5. Petugas upload Formulir F.2-01 yang sudah di tandatangani diatas.
6. Petugas Mencetak Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, kepesertaan JKN-KIS, dan Kartu Identitas Anak

Suatu program dikatakan efektif jika usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Junia (2010:26) efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat dalam melihat sasaran, sejauh mana sasaran program telah ditetapkan. Suatu program atau kegiatan dapat di katakan efektif apabila mampu memberikan efek, akibat, pengaruh, hasil, dan tentu memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Penilaian efektivitas ini dapat menjadi hasil akhir terkait kelanjutan program tersebut, dalam mengukur tingkat efektivitas, teori yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu teori dari Sutrisno (2007: 125- 126) yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Efektivitas Implementasi Program Anak Ceria JIPAT Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan teori dari Sutrisno dalam mengukur efektivitas.

**1. Pemahaman Program**

Pemahaman program yaitu melihat bagaimana program Anak Ceria JIPAT dapat membuat pihak yang terlibat mampu mengetahui tugas dan tanggungjawabnya serta masyarakat mengetahui dan memahami maksud dari program yang dilaksanakan, dalam hal ini dibutuhkan peranan para perangkat daerah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi mengenai Program Anak Ceria Jipat dapat tersampaikan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa pihak pelaksana di Rumah Sakit telah memahami akan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing selain itu masyarakat juga telah memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran, Namun dalam wawancara kepada Perangkat Desa ditemukan hasil wawancara bahwa seringkali masyarakat yang membawa Formulir Pelaporan Kelahiran (Formulir F.2-01) tanpa melampirkan berkas pendukung lainnya, padahal Desa juga membutuhkan berbagai berkas persyaratan itu sebagai bukti administrasi bayi baru lahir.

**2. Tepat Sasaran**

Dalam Implementasi program yang ingin dilihat adalah ketepatan sasarannya apakah sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya atau sebaliknya. Oleh karena itu, keberhasilan sangat berpengaruh dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa Program Anak Ceria Jipat dapat dikatakan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan yaitu mampu melampaui target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan memanfaatkan program/inovasi tersebut.

PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN) 0 - 5 Tahun											
NO	KECAMATAN	PENDUDUK (LK)	PENDUDUK (PR)	PENDUDUK (JML)	BELUM MEMILIKI (LK)	BELUM MEMILIKI (PR)	BELUM MEMILIKI (JML)	MEMILIKI (LK)	MEMILIKI (PR)	MEMILIKI (JML)	KEPEMILIKAN (%)
1	KEMANGKON	2.591	2.328	4.919	76	60	136	2.515	2.268	4.783	97,24
2	BUKATEJA	3.365	3.121	6.486	107	81	188	3.258	3.040	6.298	97,10
3	KEJOBONG	2.170	2.138	4.308	57	64	121	2.113	2.074	4.187	97,19
4	KALIGONDANG	2.724	2.530	5.254	69	54	123	2.655	2.476	5.131	97,66
5	PURBALINGGA	2.117	2.003	4.120	44	39	83	2.073	1.964	4.037	97,99
6	KALIMANAH	2.178	2.061	4.239	54	46	100	2.124	2.015	4.139	97,64
7	KUTASARI	3.126	2.940	6.066	130	128	258	2.996	2.812	5.808	95,75
8	MREBET	3.592	3.247	6.839	186	119	305	3.406	3.128	6.534	95,54
9	BOBOTSARI	2.149	2.097	4.246	93	103	196	2.056	1.994	4.050	95,38
10	KARANGREJA	2.245	2.033	4.278	84	82	166	2.161	1.951	4.112	96,12
11	KARANGANYAR	1.847	1.694	3.541	97	92	189	1.750	1.602	3.352	94,66
12	KARANGMONCOL	2.564	2.491	5.055	52	58	110	2.512	2.433	4.945	97,82
13	REMBANG	2.998	2.773	5.771	124	90	214	2.874	2.683	5.557	96,29
14	BOJONGSARI	2.770	2.552	5.322	128	101	229	2.642	2.451	5.093	95,70
15	PADAMARA	1.890	1.835	3.725	34	35	69	1.856	1.800	3.656	98,15
16	PENGADEGAN	1.663	1.505	3.168	46	47	93	1.617	1.458	3.075	97,06
17	KARANGJAMBU	1.275	1.245	2.520	65	70	135	1.210	1.175	2.385	94,64
18	KERTANEGARA	1.617	1.514	3.131	97	94	191	1.520	1.420	2.940	93,90
	<b>TOTAL</b>	<b>42881</b>	<b>40107</b>	<b>82988</b>	<b>1543</b>	<b>1363</b>	<b>2906</b>	<b>41338</b>	<b>38744</b>	<b>80082</b>	<b>96,5</b>

Gambar 1. Data PDAK Kemendagri

Disdukcapil Kabupaten Purbalingga

### 3. Tepat Waktu

Tepat waktu yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat Dinas maupun pihak yang berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa Program Anak Ceria Jipat belum sepenuhnya tepat dan sesuai waktu yang diharapkan.

Ketepatan waktu dalam Program Anak Ceria Jipat dalam hal ini belum dapat dikatakan efektif karena adanya berbagai kendala yang terjadi, yaitu adanya gangguan koneksi jaringan, terdapat masyarakat yang belum memenuhi persyaratan dalam mengurus akta kelahiran, serta masih belum efektif waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian Formulir Pelaporan Kelahiran (Formulir F.2-01) dari Sektor Desa ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Dipendukcapil terkait Program Anak Ceria Jipat, seperti kita ketahui ada beberapa kecamatan dan desa yang jaraknya jauh dari Rumah Sakit di kabupaten Purbalingga, kendala seperti ini yang membuat prosesnya menjadi lama sehingga penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan.

### 4. Tercapainya Tujuan

Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauhmana Program Anak Ceria Jipat dapat memberikan dampak serta perubahan yang nyata bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa Program Anak Ceria Jipat belum dapat dikatakan efektif karena hanya mampu memberikan perubahan nyata kepada pihak yang berkolaborasi, yaitu mampu memberikan perubahan keadaan, baik dari keadaan sulit menjadi lebih baik. Tetapi disisi lain perubahan belum dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat yang berdomisili jauh dan melahirkan di Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan yang berada di kota Purbalingga.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi program Anak Ceria JIPAT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif. Namun masih belum menunjukkan *Good Public Policy Governance* hal ini ditunjukkan masih ada beberapa indikator dalam Implementasi belum maksimal. Berdasarkan indikator pada pengukuran efektivitas pada Program Anak Ceria JIPAT dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelaksanaan Program Anak Ceria Jipat dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pemahaman program, menunjukkan bahwa pihak pelaksana telah memahami akan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing - masing selain itu masyarakat juga telah memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran.

Tepat Sasaran, dapat dikatakan efektif dalam Implementasi capaian sasaran yang telah ditentukan yaitu mampu melampaui target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan memanfaatkan sistem kolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah terkait. Ketepatan waktu, menunjukkan belum dapat dikatakan efektif karena terdapat hambatan yang dirasakan oleh beberapa pihak dalam mengurus akta kelahiran diantaranya masalah koneksi jaringan yang tidak stabil, masih belum efektif waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian Formulir Pelaporan Kelahiran (Formulir F.2-01) dari Sektor Desa ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan dikarenakan jarak tempuh dari desa yang bersangkutan ke fasilitas Kesehatan yang jauh sehingga proses penyelesaian akta kelahiran tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Tercapainya tujuan, belum berjalan dengan baik peneliti menemukan masih adanya SOP yang menghambat bagi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran. Perubahan Nyata, menunjukkan belum dapat dikatakan efektif dalam implementasinya karena hanya mampu memberikan perubahan nyata kepada pihak yang berkolaborasi, tetapi disisi lain perubahan belum dapat dirasakan oleh sebagian Masyarakat.

## SARAN

Untuk meningkatkan keberhasilan program Anak Ceria JIPAT, sejumlah saran perbaikan dapat dipertimbangkan:

1. Perbaikan Koneksi dan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur jaringan untuk menangani masalah koneksi yang tidak stabil agar proses pengurusan akta kelahiran bisa berjalan lancar dan cepat.
2. Optimalisasi Waktu Pengembalian Formulir: Upaya untuk mempercepat pengembalian Formulir Pelaporan Kelahiran (Formulir F.2-01) dari Sektor Desa ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan bisa dilakukan dengan mengkaji ulang proses logistik dan distribusi.
3. Sosialisasi Lebih Lanjut: Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang persyaratan dan prosedur pembuatan akta kelahiran sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan efektif.
4. Pembenahan SOP: Membuat perbaikan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menghambat masyarakat dalam mengurus akta kelahiran agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.
5. Evaluasi Perubahan yang Diharapkan: Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat dari program ini dapat tercapai secara menyeluruh, bukan hanya pada pihak yang berkolaborasi.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan program Anak Ceria JIPAT dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dan memberikan perubahan yang lebih nyata kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasarannya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dengan tulus ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh individu dan lembaga yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang luar biasa dalam memperlancar jalannya penelitian ini. Adapun kepada semua yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan bantuan teknis selama proses penelitian, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi yang berarti bagi kelancaran penyelesaian penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- (Akib, 2010) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana
- (Anis et al., 2021) Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa
- (Armaniah et al., 2019) Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bengkel Ahas Honda Tangerang
- (Busro, 2018) Manajemen sumber Daya Manusia
- (Eprilianto et al., 2020) Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Desa Digital
- (Haryono, 2012) Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik
- (Istiyanto & Sutanta, 2012) Model Interoperabilitas Antar Aplikasi E-Government
- (Purnamawati et al., 2022) Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
- (Sudrajat, 2021) Relasi Aktor, Institusi Dan Lingkungan Kebijakan Publik : Analisis Kebijakan Pendidikan Antikorupsi
- (Sururi, 2017) Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance
- (Suzani, 2022) Efektivitas Penerapan Aplikasi Online Single Submission dalam Pelaksanaan Pelayanan Public di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
- (Yafie Amaratus Sania, Supri Hartono, 2023) Etika Pelayanan Administrasi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
- (Yelvita, 2022) Implikasi Pemerintah Terkait Pelayanan Publik Secara Online Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
- (Yuliah, 2008) Implementasi Kebijakan Pendidikan
- <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2465396068/purbalingga-launching-aplikasi-anak-ceria-jipat-libatkan-dindukcapi-bidang-kesehatan-simak-selengkapnya>
- <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2023/07/template-posting-2023-2.png>

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/571/cakupan-akta-lahir-nasional-9285-persen-lampau-target-9-provinsi-masih-merah> (data terkait capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran) di bagian tepat sasaran

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111298/permendagri-no-19-tahun-2018>